

TAJUK RENCANA

Bahasa Indonesia Menuju Bahasa Resmi ASEAN

TIBA-TIBA muncul alangan netizen memasang twibbon yakni semacam famlet dengan bingkai menarik, sebaga dukungan bahwa Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi ASEAN. Dukungan ini bergaung dan viral, setelah secara resmi Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yakob meminta agar Indonesia resmi memberi dukungan bahwa bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi ASEAN.

Bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara, serta sebagai bahasa resmi. Bersediakah Indonesia? Tentu saja sangat berkeberatan. Mendikbud Ristek Nadiem langsung mengatakan "Saya sebagai mendikbud Risteka tentu menolak" katanya. Permintaan tersebut harus dikaji lebih matang. Dibahas terlebih dulu di tataran regional. Menurutnnya Bahasa Indonesia justru lebih layak menjadi bahasa resmi. Tentu dengan sejumlah pertimbangan, bahwa bahasa Indonesia punya keunggulan historis, hukum dan lingustik.

Mengapa Indonesia berkeinginan keras, agar menjadi bahasa resmi ASEAN?. Sebab sangat mempengaruhi faktor ekonomi Indonesia yang akan semakin terdongkrak. Adanya pasar bebas ASEAN memungkinkan bahasa akan berpengaruh. Kemungkinan jika menjadi bahasa resmi ASEAN, sangat mendukung bahasa Indonesia sebagai pijakan untuk ego internasional. Mengapa harus emenangkan ASEAN? Sebab Indonesia belum kuat nilai tawarnya dalam pergaulan internasional. Karenanya ASEAN menjadi pijakan untuk mendapat perhatian dunia. Apalagi Indonesia termasuk negara kuat di ASEAN yang sangat diperhitungkan.

Sebagai negara yang punya sumber daya alam yang banyak, kaya akan kebudayaan dan bahasa daerah, akan makin terdongkrak menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan. Bahkan saat ini kita berada pada era informasi yang maju , dengan teknologi ini gaung Indonesia

akan menjadi makin bagus.

Karena itu, Indonesia harus berusaha menjadi bahasa Indonesia bahasa resmi di ASEAN. Saat ini menurut data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek, bahasa Indonesia sudah menyebar ke 47 negara se dunia. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) sudah ada di 428 lembaga. Jumlah tersebut terdiri yang resmi difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau yang diselenggarakan mandiri oleh pegiat BIPA seluruh dunia. Bahkan bahasa Indonesia itu diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus ternama di Eropa, Amerika Serikat serta Australia, bahkan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di negara Asia.

Kemendikbud bahkan sudah memberi alasan, mengapa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa Internasional. Di antaranya disebutkan, bahwa bahasa Indonesia itu resmi digunakan dengan regulasi. Sedangkan bahasa Melayu tidak. Mengapa? karena jumlah kosakata pun Indonesia jauh lebih banyak, dan terus berkembang meski pandemi melasnda. Bahkan disiapkan menjadi bahasa internasional termuat dalam UU No 24 tahun 2009. Tingkat kesaling pahaman atau edual intelligibilityf lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Melayu. Status dan fungsi bahasa Indonesia, ditegaskan dalam UU No 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara.

Dengan demikian, semakin terlihat bahwa potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa daerah di ASEAN sangat tampak. Namun untuk menjadi seperti yang kita inginkan, perlu dukungan semua pihak khususnya para penutur bahasa Indonesia. Diharapkan semua penutur menggunakan bahasa yang baik. Hal ini saja sudah menjadidukung positif bagi usaha Indonesia. Banyak orang merasa bangga kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa lain, sehingga bahasa Indonesia menjadi kacau. (***)

Desa Sebagai Pilar Keistimewaan

DALAM konteks keistimewaan Yogyakarta ada peran baru yang disandang para kepala desa. Sesuai Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2020, sebutan Kepala Desa berubah menjadi Lurah. Mereka pun kini memiliki tanggung jawab baru sebagai pemangku keistimewaan. Lebih dari sebagai pelaksana tugas administratif kelembagaan dan pembangunan, para lurah harus mampu menggerakkan dinamika kebudayaan, mengelola urusan pertanian, dan tata ruang berdasarkan kearifan lokal.

Perubahan nomenklatur kelembagaan pemerintahan di level bawah dari desa menjadi kalurahan dimaksudkan antara lain untuk menggerakkan dan membumikan urusan keistimewaan. Ini bukan hal mudah dikerjakan mengingat masih adanya semacam dualisme peran. Meskipun nama dan jabatan telah mengacu ke keistimewaan, tetapi tugas harian lurah berikut perangkat kalurahan masih sama. Yakni seputar penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Lalu bagaimana dengan tanggung jawab barunya sebagai pemangku keistimewaan?

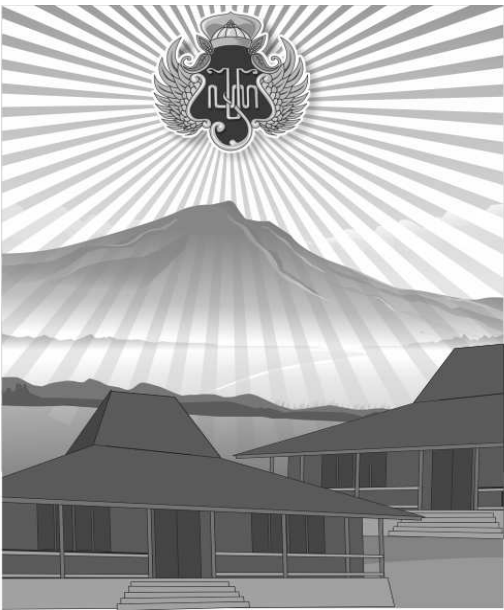
Strategis

Sejarah mencatat peran desa yang sangat strategis dari masa ke masa terutama saat bangsa mengalami krisis. Pada masa revolusi fisik (1948-1949), desa-desa di wilayah DIY merupakan kantong sekaligus perisai bagi pejuang. Secara berantai rakyat pedesaan menjadi tameng perjuangan Panglima Besar Sudirman saat NKRI berada di titik nadir. Begitu juga pada masa krismon (1997-1998) atau pandemi Covid-19 (2020-2021), desa mampu menjadi salah satu penopang ekistensi negara. Desa tetap saja mampu menampung warganya yang terdampak krisis dan pandemi saat mereka harus kembali pulang kampung.

Fenomena di atas adalah modal berharga bagi para lurah. Bahwa desa

Wahjudi Djaja

dalam pengertian historis sosiologis memiliki segudang potensi yang bisa dikelola dan diberdayakan untuk kepentingan yang lebih luas. Desa-desa kita kaya dengan jejak sejarah arkeologis, seni, adat tradisi, budaya, kerajinan, pertanian, kuliner dan beragam kearifan lokal yang bisa diangkat untuk kepentingan pariwisata. Kohesi sosial yang masih terjaga (*golong gilig*) merupakan modal sosial



yang penting untuk menahan disintegrasi dan gempuran budaya asing. Itulah kenapa desa kita sesungguhnya memiliki watak *hamandoro* yakni berdaya, berdikari dan mandiri karena mampu memutuskan dan menyelesaikan masalahnya sendiri.

Selain harus mewarisi karakter Ki Lurah Semar sebagai *pamomong* yang mengayomi, para lurah juga harus rela bela bakti demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Kondisi ini mensyaratkan lurah bisa mengidentifikasi dan memberdayakan potensi desanya, mendesain program yang membumi, sekaligus menawarkan solusi atas sejumlah permasalahan yang membelit warganya.

Kota Yogyakarta 50 Tahun Lalu

SEBUAH dokumen berjudul 'Buku I B Naskah Rapat Kerja Rukun Kampung se Kotamadya Yogyakarta' dapat menjadi potret dinamika Kota Yogyakarta selama 50 tahun terakhir. Dokumen tersebut merupakan bundel dari materi yang disajikan dalam Rapat Kerja Rukun Kampung (RKRK) pada 10 - 13 April 1972 di Sasana Hinggil Dwi Abad. RKRK mencanangkan pola 3T, yaitu: tertib kampung, tertib bertetangga, dan tertib kelurga untuk mencapai Kampung Bahagia. Dokumen setebal 246 lembar dalam ukuran folio dengan jenis kertas ada yang buram untuk materi yang berisi uraian, sedangkan yang HVS tebal berisi gambar-gambar materi presentasi narasumber. Beberapa naskah ketikan atau stensilan, mulai agak kabur. Dalam hal penulisannya masih menggunakan ejaan lama sebelum berlakunya EYD.

Menarik

Ada banyak hal menarik dari dokumen ini untuk dikomunikasikan kepada publik. Secara sosiohistoris, dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan kehidupan sosial masyarakat maupun pemerintahan Kota Yogyakarta pada masa lalu.

Dilihat dari aspek isi materi yang terkompilasi dalam dokumen RKRK 1972, dapat dipilah menjadi empat kategori. Pertama, materi yang bersifat umum terkait dengan pembangunan desa/kampung. Terdiri dari: (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung, suatu pembahasan dari segi sosial ekonomis; (2) komunikasi dan kepemimpinan; (3) peranan penerangan dalam masa pembangunan; (4) garis-garis pokok dari pada pelaksanaan pembangunan masyarakat desa/kampung; dan (5) pemeliharaan ayam dengan cara potstal.

Kedua, jenis materi yang disampaikan pimpinan kantor di lingkungan Kotamadya Yogyakarta. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 1965 tentang Susunan Adminis-

Darmanto

trasi, Kantor dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotapraja Jogjakarta terdapat dua sekretariat dan 17 kantor. Dari jumlah tersebut ada 15 kantor yang materi presentasinya ada dalam kompilasi dokumen RKRK, dan satu sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD Kota. Adapun 15 kantor yang materinya termuat dalam Dokumen RKRK, yaitu: Kantor Tata Pemerintahan, Perekonomian, Penghasilan, Peternakan, Koperasi Pertanian Rakyat, PD dan K, Kesehatan, Urusan Perumahan, Urusan Pegawai, Pekerjaan Umum, Perencanaan Kota, Urusan Penduduk, Urusan Tanah, dan Kantor Keuangan.

Ketiga, jenis materi yang disampaikan instansi vertikal. Ada beberapa instansi vertikal yang terlibat dalam RKRK, yaitu: Kantor Sensus (BPS), Direktorat Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Direktorat PKAK Departemen Sosial, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri, dan Markas Resort Hansip/Wanra Kotamadya Yogyakarta.

Keempat, jenis informasi tentang regulasi yang terdiri dari dua kategori. Kategori pertama, regulasi yang dibuat Pemerintah Kotamadya Yogyakarta, yaitu salinan: (1) Penetapan Walikota Nomor 12/1969 tentang Pembentukan Kantor Tata Pemerintah Kotamadya; (2) SK Wali Kota No. 58/K.D/1972 tentang Penunjukan Kepala Seksi Bagian Rumah Tangga Balai Kota Kotamadya; (3) Penetapan Walikota No. 13 Tahun 1969 tentang Perubahan Tarif Biaya tempat penjualan di pasar-pasar Kotamadya; (4) Penetapan

Artinya, dalam perspektif baru ini peran lurah identik dengan seorang pionir dan entrepreneur sejati.

Predikat

Selama ini banyak predikat yang melekat atau dilekatkan pada desa, namun kadang bersifat parsial dan sulit ditemukan keberlanjutannya. Masing-masing program yang menyangkut desa tersebut biasanya memiliki pendamping, tetapi nyaris tak pernah ada koordinasi dan sinergi untuk menginisiasi sebuah program bersama yang terintegrasi agar memiliki daya dobrak yang kuat.

Pilihan paling rasional bagi para lurah selama menjabat sekaligus sebagai pemangku keistimewaan adalah mewujudkan Desa Mandiri Budaya. Sesuai Pergub Nomor 93 Tahun 2020, desa mandiri budaya adalah desa yang mahardika, berdaulat, berintegritas dan inovatif. Oleh karena itu, Lurah dituntut mampu mensinergikan keberadaan Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Preneur, dan Desa Prima sesuai konteks masing-masing kalurahan. Hanya dengan begitu, keistimewaan Yogyakarta bisa dirasakan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat pedesaan.

*) **Wahjudi Djaja SS MPd, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Dosen STIE Pariwisata API Yogyakarta & Anggota BPPS.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

 pikiranpembaca@gmail.com  **0895-6394-11000**

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sesuaikan Segera Garis Marka Depan Bonbin

GARIS marka sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan. Saat ini persis di depan kebon binatang Gembira Loka, sudah diberi pembatas jalan dengan beton, namun garis marka dari arah timur ke barat masih lurus hingga mengenai trotoar. Mohon pihak terkait, garis marka bagian tengah agar dipertemukan dengan garis marka tengah agak belok ke kiri sedikit pas timur jembatan.

Ini menjadi penting, mengingat sudah hampir jelang lebaran. Dan DIY menjadi tujuan wisata. Sehingga garis-garis marka selain berfungsi keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengendara juga keindahan kota Yogyakarta, sebagai kota heritage, kota budaya dan kota pelajar.

Eko Mulyadi, warga Yogya dan Guru Proyek IPAS-Fisika SMKN 3 Yogyakarta.

Asyiknya Bermusik Rebana di Bulan Ramadan

MADRASAH menjadi sentra mengenalkan seni Islami pada siswanya, khususnya rebana. Dan madrasah menjadi ladang pengembangan. Pasalnya rebana merupakan karya monumental. Bisa disimak sejak zaman Nabi. Kala itu beliau menganjurkan saat ada perjanjian pernikahan shahabatnya diminta untuk memperdengarkannnya music walau hanya dengan memukul genderang. Menjadi perlu, di sela pembela-

jaan, siswa diajak berlatih rebana. Dari sini mereka bisa dan lihai melantunkan lagu yang bermafakan agama. Bila rutin dilatihkan, bukan sekadar mengenalkan seni Islami tapi juga bisa bisa melatih mental di hadapan masyarakat. Bukan hanya tampil di moment penting di madrasah, seni ini bisa ditampilkan dalam kegiatan rasulan bahkan bersih desa.

Rofidat Nuraningsih, MIN 3 Gunungkidul

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Jko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efty Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi:Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga .

Semarang : Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP